

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan unit usaha ekonomi kerakyatan yang berdasarkan azas kekeluargaan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor04/Per/M.KUKM/VII/2012 menjelaskan bahwa “koperasi sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya”. Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi.

2.1.2. Jenis-jenis Koperasi

Menurut (Agung 2011, 65) jenis-jenis koperasi yang berkembang di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan suatu unit usaha yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai barang konsumsi. Kegiatan usaha koperasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yang beranggotakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Peran para pelaku UKM ini yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan usaha koperasi produksi. Contoh koperasi produksi yaitu, koperasi susu sapi perah, pertanian, kerajinan dll.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa anggota guna membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memberikan layanan jasa kepada anggota atau masyarakat. Contoh koperasi jasa yaitu, koperasi asuransi dan koperasi jasa transportasi.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah unit usaha yang kegiatannya meliputi semua bidang usaha seperti produksi, simpan pinjam, konsum

2.1.3. Sumber Modal Koperasi

Sumber Modal Koperasi di atur dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 41 , yaitu :

a. Modal Sendiri

Adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai penanam modal yang dapat di pergunakan oleh koperasi. Modal ini berasal dari : Simpanan pokok, Simpanan wajib dan Simpanan sukarela.

b. Modal Pinjaman

Adalah berasal dari anggota, bank dan anggota, koperasi lainnya serta lembaga-lembaga lain yang sah.

2.1.4. Landasan Koperasi

Pendiri koperasi tentu memerlukan landasan untuk membangun sebuah koperasi yang kokoh, serta sebagai dasar untuk berkembangnya suatu unit usaha. Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.

- Landasan Idiil = Pancasila
- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

2.1.5. Fungsi Koperasi

Dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

- b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

2.1.6. Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

- 1. Manfaat koperasi di bidang ekonomi :
 - a. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.
 - b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
 - c. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan.
 - d. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi.
 - e. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
- 2. Manfaat koperasi di bidang sosial :
 - a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
 - b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
 - c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

2.1.7. Prinsip Koperasi

Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi yaitu :

- 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
- 3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota
- 4. Modal diberi balas jasa secara terbatas
- 5. Koperasi bersifat mandiri

Menurut Teori Klasik, jenis koperasi ada 3, yaitu koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil, dan sebagainya), koperasi penghasil atau koperasi produksi, dan koperasi simpan-pinjam. Sedangkan berdasarkan aktivitas ekonomi para anggotanya, jenis koperasi terbagi menjadi tiga, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi kredit atau jasa pembiayaan.

2.1.8. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisikan informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, berikut dikemukakan beberapa pengertian mengenai laporan keuangan.

Menurut (Ikatan 2012) “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan menurut (Lili 2010) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban dari manajemen terhadap pemilik perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu entitas.

Menurut (Ikatan 2012), laporan keuangan bertujuan sebagai berikut :

- Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

- Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Tujuan laporan keuangan menurut (Hans dan dkk 2016, 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.

Kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diberikan tersebut bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan untuk melaporkan aktivitas dan kinerja perusahaan yang berpengaruh terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), baik di internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.9. Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

2.1.10. SAK ETAP

A. Pengertian SAK ETAP

SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standart pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas atau badan usaha. Standart pelaporan tersebut telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada bulan Mei 2009 dan SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

Mackenzie (2012) menyebutkan entitas yang termasuk dalam ETAP adalah agen koperasi yang mengharuskan iuran keanggotaan, dan penjual yang menerima pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik diperbolehkan menggunakan SAK ETAP jika ada otorisasi yang berwenang membuat regulasi yang menyatakan mengizinkan penggunaan SAK ETAP kepadanya. Menurut SAK ETAP (2009) “Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP”.

Pemahaman terhadap SAK ETAP sangat diperlukan sebelum melaksanakan pelaporan keuangan yang berdasarkan kepadanya. Jika tidak memiliki pemahaman yang baik mengenainya maka kualitas dari laporan keuangan tersebut akan menjadi diragukan. Menurut Indra Wijaya Kusuma (2007) “pengalaman adopsi IFRS di Negara berkembang menunjukkan umumnya kesulitan terletak pada kesiapan profesi dan pendidikan akuntansi”. Pentingnya pengetahuan yang baik terhadap SAK-ETAP sebelum diterapkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus diutamakan. Jika kekurangan pengetahuan akan mengakibatkan mengganggu kualitas laporan dan ketepatan waktu pelaporan, dan akan menurunkan kemampuan bersangentitas yang berkaitan dalam dunia usaha.

Entitas yang diizinkan untuk menggunakan SAK-ETAP adalah entitas yang :

1. Tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. Entitas sudah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas memiliki wewenang untuk membuat regulasi izin penggunaan SAK-ETAP.

B. Manfaat dan Tujuan SAK ETAP

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunaannya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80%. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

C. Karakteristik SAK ETAP

Berikut ini merupakan karakteristik SAK ETAP (Gracentine 2018) Stand alone accounting standard (tidak mengacu ke SAK Umum)

- a. Mayoritas menggunakan historical cost concepts
- b. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah
- c. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum

- 1) Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana
- 2) Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran
- 3) Pengurangan pengungkapan
- d. Tidak akan berubah selama beberapa tahun

D. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP

Pada SAK-ETAP menyatakan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal.

Lebih lagi SAK-ETAP menjelaskan pengakuan unsur laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5. Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

E. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP

Dalam SAK-ETAP pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Pada SAK-ETAP juga menjelaskan dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

F. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP

SAK-ETAP juga menjelaskan pelaporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*. Penerapan SAK-ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK-ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Selanjutnya informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan oleh SAK-ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk

informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Andreas (2014) dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus pada KPRI di Kota Bandar Lampung) menyatakan bahwa KPRI sudah melakukan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan namun sebagian besar laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI tidak sesuai dengan SAK ETAP. Lewat hasil wawancara penulis menemukan banyak faktor yang menyebabkan KPRI tidak menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Antara lain: Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai SAK ETAP serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang SAK ETAP kepada pengurus KPRI. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP perlu dilakukan oleh KPRI agar laporan keuangan yang disajikan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi KPRI tersebut.

Ni Luh Gede Ariantini (2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan.

Ade Astalia Pratiwi (2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.

Raflesia Nurdita JS (2013) menyimpulkan dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai bahwa secara garis besar pengurus koperasi yang ada di kota Dumai telah menerapkan akuntansi

seederhana dalam pelaporan pertanggungjawaban. Tetapi laporan keuangan yang diselenggarakan masih belum sesuai dengan format SAK ETAP.

Menurut Ni Nyoman Pera Yati, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adi Putra (2013), dalam jurnal penelitian yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana Universitas Pendidikan Ghanesa Tahun Buku 31 Desember 2013 berdasarkan SAK ETAP diperoleh kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana tahun 2013 telah sesuai dengan SAK ETAP namun belum lengkap. Hal ini berdasarkan atas alasan koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP adalah karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia, tidak adanya pembinaan dari dinas koperasi serta tidak adanya tuntutan dari dinas koperasi maupun masyarakat terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen koperasi. sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri karena adanya biaya yang tidak tercatat

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Variable yang diteliti	Hasil Penetian
1	Andreas (2014)	Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus pada KPRI di Kota Bandar Lampung).	Metode yang digunakan adalah Kualitatif	Variabel dependen	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi laporan keuangankoperasi lampung lestari pertiwi, koperasi tri satya dharma, koperasi cipta karya,koperasi simpan pinjam pedagang kecil, Primer koperasi wredatama, Koperasiragom sepakat, Koperasi wanita indoman marga, koperasi dharma yukti, dankoperasi pilar utama sudah sesuai dengan SAK ETAP

2	Ni Luh Gede Ariantini (2014)	Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri	Metode yang di gunakan adalah kuantitatif	Variabel dependen	<p>Penerapan dalam SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri tahun 2013 sebesar Rp 34.960.000.</p> <p>Penurunan ini diakibatkan adanya biaya-biaya yang tidak tercatat pada laporan sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh KSP Lembang Sejahtera Mandiri seperti, biaya honor pengurus, biaya pelatihan, biaya sosial, dan biaya pembangunan daerah kerja.</p>

3	Ade Astalia Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT.Nichindo Manado Suisan	Metode yang digunakan adalah Kualitatif	Variabel dependen	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Peneliti menemukan bahwa terjadi inkonsistensi pada beberapa pos dalam Penyajian Neraca PT. Nichindo. Hal ini berdasarkan Neraca 2011 dan 2012 pada <i>section</i> Aser Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Hutang Jangka Pendek. PT Nichindo belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak ada pernyataan eksplisit dan secara penuh mengenai kepatuhan SAK ETAP pada catatan atas laporan keuangan dan tidak asanya pengungkapan seluruh kebijakan akuntansi.
---	----------------------------	---	---	-------------------	--

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Variable yang	Hasil Penetian
----	---------------	-------	-----------------	---------------	----------------

				diteliti	
4	Raflesia Nurdita JS (2013)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai	Metode yang digunakan adalah Kualitatif	Variabel dependen	Hasil analisis hanya dua koperasi saja yang dapat dikatakan susah sesuai dengan SAK ETAP, yaitu Koperasi Pilar Utama (kategori koperasi dengan nilai aset antara 0 – 500 Juta) dan Kopkar Pelita (kategori koperasi dengan nilai aset lebih dari 1 miliar) baik dari penyajian, dasar pengukuran, sampai metode yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Dan secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara koperasi yang nilai asetnya tinggi dan koperasi yang nilai asetnya rendah dalam menerapkan SAK ETAP.

No	Nama	Judul	Metode	Variable	Hasil Penetian
----	------	-------	--------	----------	----------------

	Peneliti		Analisis	yang diteliti	
5	Ni Nyoman Pera Yati (2013)	Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana Universitas Pendidikan Ghanesa Tahun 31 Desember 2013 berdasarkan SAK ETAP	Metode yang digunakan adalah Kualitatif	Variabel dependen	Penyajian laporan keuangan Koperasi Mahasiswa "Citra Dana" tahun 2013 telah sesuai dengan SAK ETAP, namun belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya laporan perubahan ekuitas yang memuat perubahan kekayaan bersih koperasi dari tahun 2012 ke 2013 serta catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2012 kekayaan bersih atau ekuitas koperasi diketahui Rp. 500.754.351,01 sedangkan ekuitas tahun 2013 Rp. 540.732.972,24. Sehingga kekayaan bersih koperasi mengalami perubahan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp. 40. 158.621,23 yaitu meningkat sebesar 8,02 %.

- I. Andreas (2014), Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus pada KPRI di Kota Bandar Lampung).

Persamaan :

- Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
- Objek penelitian yang digunakan Koperasi, yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia
- Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada pelaporan Koperasi

Perbedaan :

- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama. Penelitian terdahulu dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Kota Bandar Lampung dan jumlah objek yang dilakukan lebih dari 1 objek
 - Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Kota Malang
- II. (Ni, Anjuman dan Made 2014), Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri

Persamaan :

- Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi
- Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada pelaporan Koperasi

Perbedaan :

- Beda jenis penelitian dan jenis objek penelitian
- Penelitian terdahulu Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan jenis objek penelitian memakai Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Singaraja Bali
- Penelitian sekarang jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan jenis objeknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Kota Malang

III. (Ade, Jullie dan Lintje 2014), Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT.Nichindo Manado Suisan

Persamaan :

- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif
- Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan suatu perusahaan

Perbedaan :

- Beda objek dan lokasi penelitian
- Penelitian terdahulu memakai objek pada suatu perusahaan yang ada di Manado
- Penelitian sekarang memakai objek Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Kota Malang

IV. (Nurdita 2013), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai

Persamaan :

- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif
- Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi
- Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan Koperasi

Perbedaan :

- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama.
- Penelitian terdahulu dilakukan di koperasi yang ada di Kota Dumai
- Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Kota Malang

V. (Ni, Anantawikrama dan Made 2014), Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adi Putra, Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana Universitas Pendidikan Ghanesa Tahun Buku 31 Desember 2013 berdasarkan SAK ETAP

Persamaan :

- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif

- Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi
- Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui cara penyajian laporan koperasi berdasarkan SAK ETAP

Perbedaan :

- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama
- Penelitian terdahulu dilakukan di Koperasi Mahasiswa yang ada di Singaraja Bali
- Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Kota Malang

2.3. Kerangka Berpikir

Dengan kerangka konseptual mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Secara sederhana, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

